



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 936416

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.019.000.000

- Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
- Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
- Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 355.000.000

- MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
- MOTOR, HONDA BEET Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5 L ULTIMATE-L (4X2) A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 31.627.680

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.405.627.680



III. HUTANG

Rp. 255.383.700

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.150.243.980

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.